

Bab I.

Pendahuluan

I.1.Latar Belakang

Dunia ketenagalistrikan di negeri ini merupakan sektor yang sangat penting. Hampir setiap orang baik di dalam maupun luar negeri sangat bergantung dan dapat dibayangkan tidak dapat hidup tanpa listrik. Untuk itu kebutuhan akan listrik ini harus didukung dengan fasilitas-fasilitas pengadaan listrik yang mampu memenuhi akan kebutuhan listrik tersebut.

Menurut Undang-undang (UU) No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, diatur bahwa:

“Bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

*Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”.*¹

Yang juga dijelaskan pada pasal 3 UU No.20 tahun 2002 bahwa:

*“Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan”.*²

Berdasarkan ketentuan dalam UU No.20 seperti yang disampaikan sebelumnya, ketergantungan akan kebutuhan ketenagalistrikan tentunya harus dapat digunakan dan

¹ Dikutip dari UU No:20 tahun 2002 tentang: “Ketenaga Listrikan Nasional” hal.20.

² Ibid

terjangkau oleh setiap orang banyak. Untuk itu, kelistrikan nasional tidak boleh dimonopoli untuk keuntungan perorangan atau golongan tertentu, melainkan harus digunakan untuk keuntungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3.³

Perkembangan kelistrikan nasional selama ini, tidak terhindar dari pasang-surut yang cukup menyulitkan untuk mempertahankan stabilitas kondisi kelistrikan nasional untuk khalayak banyak. Seperti yang terjadi pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)(Persero) selaku penyelenggara satu-satunya untuk memasok listrik langsung kepada masyarakat dan *end-user*, dimana pasca krisis ekonomi yang sempat terjadi pada tahun 1998-2002, korporat sempat mengalami kerugian pada tahun 2000 hingga tahun 2003.⁴

Terjadinya krisis ekonomi pada periode tahun 1998 menyebabkan banyak perusahaan dari berbagai bidang usaha di Indonesia tumbang dari dunia usaha, atau mengalami pailit⁵. Adapun penyebab utama dikarenakan hutang yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut yang kemudian tidak mampu dilunasi pasca krisis ekonomi pada tahun 1998, karena semenjak krisis mulai melanda, banyak dari nilai hutang tersebut ditambah bunga, membengkak jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai pokok hutang itu sendiri saat pertama kali dilakukan⁶. Alasan lainnya juga dikarenakan harga berbagai macam barang kebutuhan pasca krisis membengkak, sehingga *demand* dari masyarakat terus menurun, yang tentunya semakin menyulitkan

³ Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah perubahan ke-IV: Pasal 33:

Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁴ Dikutip dari buku "PLN Statistic Year 2005". Hal:60.

⁵ Dikutip dari:

http://209.85.175.104/search?q=cache:rvOXQH7LoQJ:www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_etc.htm+perusahaan-perusahaan+banyak+mengalami+kebangkrutan+dan+kesulitan+usaha+semenjak+krisis+tahun+1998&hl=id&ct=clnk&cd=6&gl=id

⁶ Ibid

para pengusaha, karena secara otomatis harga barang maupun kebutuhan yang di-*supply* oleh para pengusaha tersebut akan naik⁷.

Kondisi krisis tersebut juga berdampak kepada operasional PT.PLN(Persero). Dimana banyak dari produsen berbagai produk di tanah air, yang sebelumnya memiliki sumber listrik sendiri untuk menghidupi kapasitas produksinya, memilih kembali menggunakan sumber listrik dari PLN karena dinilai lebih murah⁸. Kondisi ini semakin menyulitkan PLN dikarenakan kebutuhan listrik yang bertambah, ditambah dengan belum sepenuhnya jaringan listrik dapat dinikmati setiap masyarakat, membuat PLN sering kali menghadapi defisit pasokan listrik⁹. Faktor lainnya adalah kenaikan harga sumber energi primer maupun sekunder dari pembangkit listrik yang dimiliki PLN membuat PLN memiliki ongkos produksi listrik yang lebih tinggi ketimbang harga jualnya¹⁰.

Krisis ekonomi yang telah melanda dan menyulitkan perekonomian nasional, tidak hanya dialami oleh dunia bisnis yang ada di Indonesia, namun tantangan besar untuk dapat terlepas dari belenggu dan jeratan serangkaian krisis yang ada di tanah air juga dialami oleh negara¹¹, termasuk juga dialami oleh berbagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kementerian Negara BUMN (MenNeg BUMN) memiliki sejumlah BUMN besar yang menjadi salah satu tulang punggung pemasukan dan kelangsungan hidup negara dari hasil-hasil yang diperolehnya. Krisis Ekonomi yang melandapun tidak terelakan bagi sebagian besar BUMN di Indonesia. Kejadian krisis yang berlangsung tiba-tiba, sangat besar akibatnya bagi penurunan berbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat. Dampak pemulihan kondisi bagi BUMN akibat

⁷ Ibid

⁸ Dikutip dari “*Kompas Online*”: <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0306/15/Fokus/369986.htm>

⁹ Ibid

¹⁰ Secara rata-rata, harga per-KWh listrik nasional sebesar enam ratus empat puluh lima rupiah (Rp.645,00), sedangkan PT.PLN(Persero) memproduksi listrik dengan tarif seribu tiga ratus dua puluh lima rupiah (Rp.1.325,00) per-KWh. Berdasarkan tarif dasar listrik PT.PLN(Persero) tahun 2007

¹¹ Tidak hanya krisis ekonomi yang menyulitkan kondisi sosial dan ekonomi nasional, namun juga terdapat tantangan besar untuk mencari solusi agar dapat terlepas dari krisis tersebut.

krisis tersebut tidak semudah dan secepat proses krisis yang terjadi saat itu. Tidak sedikit dari BUMN ini yang juga terkena krisis keuangan, yang menghambat kinerja dan fungsinya untuk membantu kelangsungan hidup negara. Banyak dari BUMN ini terlilit hutang, dan semakin diperparah dari nilai hutang tersebut setelah krisis melanda. Seperti contoh pada perusahaan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia ("Garuda") yang merupakan *Nation Flag Carrier and Pride* bagi dunia penerbangan Nusantara, setelah krisis membutuhkan kurang lebih tiga tahun untuk merestrukturisasi hutang perusahaan yang membengkak dan belum dapat dilunasi, semenjak tahun 1999-2002.¹² pada tahun-tahun ini, merupakan kemunduran yang luar biasa bagi Garuda Indonesia, sehingga Garuda harus menunda pemesanan beberapa unit armada baru seperti *Boeing 737NG, 737-800, 777-200, 777-300ER, dan Boeing 787-8(dreamliner)* untuk peremajaan armada yang dimiliki yang telah dipesan pada pertengahan tahun 1997 dengan rencana pembayaran 1998-2000 dari salah satu perusahaan produsen kapal terbang raksasa dunia yaitu *Boeing.Co* Amerika Serikat¹³. Contoh ini membuktikan bahwa BUMN yang telah *well-established* pun tidak dapat terhindar dari dampak krisis ekonomi.

Kenaikan beberapa barang pokok yang telah berlangsung semenjak krisis terjadi, membuat daya beli masyarakat menurun. PT.PLN(Persero) sendiri, harus menjaga pasokan kebutuhan listrik nasional dengan harus menetapkan tarif dibawah harga produksinya. Hal ini dikarenakan kemampuan masyarakat yang dinilai belum atau kurang mampu menerima tarif listrik yang tinggi, karena masyarakat membutuhkan

¹² Dikutip dari <http://www.angkasa-online.com>

¹³ Dikutip dari <http://www.boeing.com>

listrik, maka berbagai upaya dilakukan untuk dapat menekan harga jual listrik kepada masyarakat serendah-rendahnya. Untuk itu, subsidi harus dilakukan.¹⁴

Sesuai peraturan pemerintah RI nomor 18 tahun 1972 juncto peraturan pemerintah RI nomor 54 tahun 1981 dan UU nomor 15 tahun 1985 juncto peraturan pemerintah RI nomor 17 tahun 1990 tentang ketenagalistrikan ditetapkan bahwa PLN adalah BUMN yang ditetapkan sebagai pemegang usaha tenaga kelistrikan yang menangani penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum yaitu industri, usaha komersial, rumah tangga, dan kegiatan sosial.¹⁵

Setelah perusahaan ketenagalistrikan dilakukan oleh PLN yang telah berstatus BUMN, kesulitan tersebut sedikit demi sedikit dapat diatasi dengan cara melakukan perbaikan, antara lain dengan diadakannya konsolidasi organisasi dengan membentuk unit perusahaan di daerah-daerah dengan eksploitasi yang membawahi sektor-sektor dan cabang-cabang untuk mengelola pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Selain itu juga dilakukan perbaikan dalam penyediaan tenaga listrik dengan menambah pusat-pusat pembangkit.¹⁶

Krisis energi listrik yang terjadi di negara kita disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara permintaan akan kebutuhan listrik dengan kemampuan PLN dalam mengantisipasi hal tersebut. Terlihat bahwa hingga tahun 1997, PLN baru mampu memenuhi 61,6% saja dari total kebutuhan listrik nasional dan hingga tahun 2005, PLN mampu memenuhi 75,79%. Terlihat bahwa pembangkitan *captive* (pembangkitan sendiri) berkembang cukup besar karena merupakan satu-satunya jawaban yang mungkin dapat dilakukan pada waktu itu untuk mengatasi kesenjangan antara penyediaan dan kebutuhan tersebut pada sistem Jawa-Bali dan terlebih lagi

¹⁴ Secara rata-rata, harga per-KWh listrik nasional sebesar enam ratus empat puluh lima rupiah (Rp.645,00), sedangkan PT.PLN(Persero) memproduksi listrik dengan tarif seribu tiga ratus dua puluh lima rupiah (Rp.1.325,00) per-KWh. Berdasarkan tarif dasar listrik PT.PLN(Persero) tahun 2007

¹⁵ Dikutip dari "PLN Company Profile Year 1997"

¹⁶ Ibid

pada sistem-sistem di luar Pulau Jawa (lampiran tabel jumlah pelanggan, daya tersambung, dan penjualan listrik di Indonesia periode 1973-2005)¹⁷.

Tabel I-1. Jumlah pelanggan dari tiap jenis tipe dari setiap periode

Number of Customers							
Type of Customer	1973/74	1978/79	1983/84	1988/89	1993/94	1998	2005
residential	913940	1584851	4046692	8665543	14191414	24902763	32174922
Industrial	7145	8087	16879	27773	38769	43088	46475
Business	78080	145588	239277	356942	514816	847940	1455797
Others	32977	44721	103229	225680	412410	639698	882159
Total	1032142	1783247	4406077	9275938	15157409	26433489	34559353
Cust. Captivity	3,93%	6,79%	26,62%	42,67%	50,67%	61,6%	75,79%

Tabel I-2. Jumlah Daya terpasang pada jumlah pelanggan

Connected Capacity (MVA)							
Type of Customer	1973/74	1978/79	1983/84	1988/89	1993/94	1998	2005
residential	398,66	992,56	2648,60	5397,11	891486	15887,50	25006,46
industrial	422,55	973,92	1857,77	4080,31	7781,84	10698,91	12961,49
business	141,06	307,91	770,00	1382,57	2780,64	5665,04	9320,81
Others	114	184,66	850,29	1373,75	1758,99	2344,39	3428,62
Total	1076,27	2459,05	6126,66	12233,74	15157409	34595,84	50717,37

Tabel I-3. Jumlah energi listrik terjual setiap periode

Energy Sold (GWh)							
Type of Customer	1973/74	1978/79	1983/84	1988/89	1993/94	1998	2005
residential	1077,30	1962,20	4291,50	7274,63	13140,74	24865,45	41184,29
industrial	596,00	1443,40	3435,90	9052,24	19560,98	27995,54	42448,36
business	220,90	430,90	1002,50	1740,14	3774,97	8655,96	17022,84
Others	320,80	450,40	1269,80	1925,83	2485,34	3744,46	6376,74
Total	2215,00	4286,90	9999,70	19992,84	38962,03	65261,41	107032,23

PT.PLN(Persero) merupakan perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan di Indonesia, serta merupakan satu-satunya perusahaan pen-*supply* listrik kepada masyarakat secara langsung. Memiliki luas usaha terbentang dari Sabang hingga Merauke, melayani lebih dari 200 juta penduduk di Indonesia. Dengan kondisi saat ini, diharapkan bagi PLN untuk dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat, serta dapat terus mengurangi subsidi dan akan meringankan kondisi anggaran negara. Untuk beberapa bidang, PT.PLN(Persero)

¹⁷ Dikutip dari Buku "PLN Statistics 2005". PT.PLN(Persero). Hal:71-73.2006

memiliki beberapa anak perusahaan yang melayani bidang-bidang tertentu. Untuk sistem kelistrikan dan jaringan di Pulau Jawa dan Bali, PT.PLN memiliki anak perusahaan PJB (Pembangkit Jawa Bali). Untuk sistem jaringan kelistrikan nasional, PT.PLN memiliki anak perusahaan PT.P3B. Untuk menangani *supply* kelistrikan Pulau Jawa dan Bali, PT.PLN(Persero) memiliki anak perusahaan yang bernama PT.Indonesia Power.

Peningkatan penyediaan tenaga listrik tentu saja tidak terlepas dari sistem kelistrikan itu sendiri. Dalam sistem ketenagalistrikan, sistem pembangkitan merupakan komponen hulu dari mata rantai produksi tenaga listrik. Fungsi dari pembangkit listrik ini adalah mengubah energi primer (misalnya air, bahan bakar, gas, batu bara, panas bumi,dll) menjadi energi listrik yang akan disalurkan melalui sistem jaringan transmisi dan dialirkan ke konsumen melalui sistem distribusinya. Perkembangan ketenagalistrikan dapat dilihat dari semakin besarnya kapasitas daya terpasang beserta sarana penyalurannya, yang berarti produksi maupun penjualan tenaga listrik makin meningkat sehingga kemampuan untuk menyambung pelanggan makin besar seperti yang dipaparkan pada tabel *number of customers* dan *installed capacity* pada halaman sebelumnya.

Semenjak dimulainya usaha kelistrikan nasional, tentunya mengalami perkembangan, akan tetapi hal ini perlu lebih ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Tabel I-4. Rencana dan Jumlah Daya terpasang tiap periode

Instaled Capacity Planned=Proceeded (MW)

Type of generating	1973/74	1978/79	1983/84	1988/89	1993/94	1998	2005
Hydro	278,77	349,67	536,44	1969,57	2178,75	3006,76	3220,96
Steam	225,00	556,25	1556,25	3416,95	4690,60	6770,60	6900,00
gas-turbine	42,00	882,07	1027,92	1233,68	995,92	1347,41	2723,63
combined cycle (MFO)					3411,31	6560,97	6280,97
Geothermal			30,00	140,00	195,00	360,00	395,00
Diesel	230,31	500,40	784,39	1769,02	2128,46	2535,02	2994,54
Total	776,08	2288,38	3934,99	8529,22	13600,05	20580,76	22515,09

Perihal perkembangan ketenagalistrikan nasional tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena usaha penyediaan tenaga listrik merupakan usaha yang padat modal. Pada masa sebelum reformasi, sumber dana yang diperoleh hanya dari dana anggaran perusahaan, penyertaan negara melalui APBN, maupun pinjaman dari dalam dan luar negeri. Namun itupun dirasakan masih sangat kurang (tabel presentasi pola pembiayaan).

Tabel I-5. Pola pembiayaan dan penyertaan modal PT.PLN (Persero)

Pola pembiayaan Penyertaan modal	89/90	90/91	91/92	92/93	93/94	rata- rata
Pemerintah (PMP)	34%	47%	60%	40%	24%	41%
Pinjaman	43%	25%	18%	49%	51%	37%
Swadana	23%	28%	22%	11%	25%	22%

Oleh karena itu, PLN harus dapat lebih mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada, dan terus mencari peluang-peluang alternatif sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk dapat mendukung perkembangan kedepan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1994 tentang perubahan status Perusahaan Listrik Negara (PLN), lembaran negara nomor 34 tahun 1994, status perusahaan umum listrik negara berubah menjadi perusahaan perseroan (persero) PT.Perusahaan listrik negara, atau disingkat PT.PLN (Persero). Perubahan tersebut mempunyai tiga dampak besar yang mempengaruhi usaha PLN:

- Menekankan perlunya PLN beroperasi sebagai suatu badan usaha niaga yang menghasilkan laba¹⁸

¹⁸ Dikutip dari “PLN Company Profile Year 2005”

- Melakukan usaha-usaha restrukturisasi PLN dengan mendirikan Unit-Unit Bisnis dan anak-anak perusahaan, dimana unit atau anak perusahaan yang menguntungkan akan dapat menarik modal swasta.¹⁹
- Mulai mengurangi ketergantungan dengan pemerintah dan mengusahakan agar PLN dapat memperoleh cukup otonomi untuk bersaing dengan para peserta-peserta baru dalam sektor tenaga listrik.²⁰

Walaupun PT.PLN(Persero) sempat mengalami kerugian pada tahun 2000-2003²¹, kenyataannya tidak semua anak perusahaan mencatat kerugian tiap tahunnya. Salah satu diantara anak perusahaan yang setiap tahun mengalami keuntungan yaitu PT.Indonesia Power. Indonesia Power merupakan salah satu dari anak perusahaan yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero). Ruang lingkup usaha dari Indonesia Power ini merupakan pengelola pembangkit listrik dan pemasok listrik dari pembangkit-pembangkitnya untuk sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali, serta beberapa wilayah kecil di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Indonesia Power menjual listrik yang dihasilkannya dengan tariff per Kwh (Kilo Watt/Hour) kepada PT.PLN sebagai pemasok langsung kebutuhan listrik kepada masyarakat melalui sistem jaringan yang dimilikinya. Dengan harga jual per Kwh yang masih di atas ongkos produksinya, membuat Indonesia Power mendapatkan keuntungan yang cukup besar pada tiap tahunnya. Tentunya dengan hal ini, dapat pula membantu penurunan defisit anggaran yang diderita induk perusahaannya, PT.PLN(Persero).

Anak perusahaan yang dimiliki PT.PLN yang mengalami keuntungan ini, tidak disia-siakan begitu saja. Bagi PLN, Indonesia Power diharapkan dapat menjadi salah satu pembantu pengurangan defisit anggaran yang dimiliki oleh internal PT.PLN(Persero) itu sendiri. Untuk selanjutnya, diharapkan bagi Indonesia Power

¹⁹ Ibid

²⁰ Dikutip dari "PLN Company Profile Year 2005"

²¹ Dikutip dari Buku "PLN Statistics 2005". PT.PLN(Persero). Hal:60.2006

dapat terus meningkatkan kinerjanya dan tetap mempertahankan tingkat keuntungan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Bagi setiap bidang usaha, berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengembangkan usahanya, agar lebih maju, dan dapat mempertahankan keuntungannya. Tidak terkecuali dengan yang dilakukan oleh Indonesia Power. Untuk tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan keuntungan, Indonesia Power membutuhkan dana segar untuk dapat mendukung rencananya. Salah satu upaya yang sekarang banyak digunakan oleh dunia usaha untuk mendapatkan modal segar untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya dengan risiko yang minimal adalah dengan melakukan IPO (*Initial Public Offering*) atau lebih dikenal dengan istilah "Go Public". Go public merupakan usaha untuk melakukan atau memperoleh tambahan dana untuk kebutuhan perkembangan perusahaan maupun investasi perusahaan kedepan, melalui pelepasan sebagian saham kepemilikan perusahaan kepada publik atau masyarakat, pada nilai tertentu. Cara ini juga sempat dilakukan oleh Indonesia Power untuk dapat memperoleh dana segar untuk berinvestasi, mendapatkan keuntungan, dan dapat memperkecil defisit anggaran setiap tahun bagi PT.PLN.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tahun 2007, dengan kondisi perusahaan yang dimiliki, Indonesia Power ingin melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau "Go Public". Akan tetapi, usaha IPO tahun 2007 ini dirasa masih kurang dibutuhkan²². Kedepan PT.Indonesia Power telah menetapkan untuk tidak membutuhkan *IPO*²³, karena disisi lain berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan dinilai bahwa sebuah perusahaan yang bergerak dalam hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat banyak²⁴.

²² Dikutip dari: <http://www.blogger.com/feeds/6777173723794844221/posts/default>

²³ Dikutip dari: <http://www.blogger.com/feeds/6777173723794844221/posts/default>

²⁴ UUD 1945 setelah perubahan, Pasal 33, Ayat.2.

Bagi Indonesia Power, perkembangan usaha kedepan dilakukan selain menggunakan jalan melakukan *IPO*, seperti menambah modal disetor untuk investasi, menggunakan modal pihak ketiga (*Third Party Financing*), dan berbagai jenis pinjaman hutang lainnya. Di Indonesia khususnya, dapat dilihat bagi Indonesia Power yang masih dapat dijadikan andalan dan salah satu tulang punggung pemasukan pengurang defisit anggaran bagi PT.PLN(Persero) untuk mengambil keputusan pendanaan untuk perkembangan usaha, investasi, dan meningkatkan keuntungan, agar dapat memperkecil defisit PT.PLN(Persero) serta dapat mengurangi subsidi pada dunia kelistrikan tanah air. Pada tahun 2007 lalu, jumlah subsidi listrik nasional sebesar 42 triliun Rupiah, dan menurut RAPBN 2008 ini, akan meningkat menjadi 55 triliun Rupiah²⁵. Diharapkan hal ini dapat sesuai dengan ekspektasi perusahaan kedepannya.

Penelitian ini ingin melihat apakah cara terbaik yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia Power untuk optimalisasi strategi pendanaan agar memiliki struktur modal yang lebih baik agar dapat mendukung perkembangan usahanya dan semakin meningkatkan keuntungannya, selain menempuh jalur *IPO*, dan bagaimana prospeknya yang lebih baik kedepan bagi Indonesia Power. Untuk itu, penulis berniat untuk melakukan penelitian yang berjudul:

”Analisa Optimasi Struktur Modal dan Manajemen Kas PT.Indonesia Power, dalam usahanya untuk memenuhi rencana ekspansi usaha yang dimiliki”

²⁵ Dikutip dari:

<http://www.hukmas.depkeu.go.id/kliping/unit.asp?kdx=unittopik&KDunit=DJPBN%20%20%20%0%20&DTopik=SUBSIDI%20%20%20&urunit=Direktorat%20Jenderal%20Perbendaharaan&urtopik=SUBSIDI%20/%20PEMBIAYAAN>

I.2. Perumusan Masalah

Pemikiran mengenai apa yang akan diterbitkan sebagai sumber pembiayaan perusahaan merupakan suatu bagian dari suatu perencanaan stratejik perusahaan yang akan berpengaruh dan berlangsung dalam jangka waktu yang penjang (lebih dari satu tahun). Dilandasi oleh pemikiran akan adanya keterbatasan sumber dana PT.Indonesia Power selama ini untuk ekspansi usaha, maka pihak manajemen harus memikirkan kekuatan dan kelemahan dari setiap efek yang akan mereka terbitkan dalam rangka mencari alternatif sumber pembiayaannya. Analisa terhadap hal di atas akan menimbulkan debat tersendiri yang menarik untuk diikuti.

Modal perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan tidak terbagi atas saham-saham. Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat berasal dari:

- Dana intern perusahaan;
- Penyertaan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
- Pinjaman dari dalam dan atau luar negeri;
- Sumber-sumber lainnya yang sah.

Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat sah lainnya, yang kesemuanya diatur melalui peraturan pemerintah.

Sehingga pembahasan dalam skripsi ini nantinya diharapkan akan membantu menjawab pertanyaan yang selama ini masih berada dalam benak para pemimpin PT.Indonesia Power dari suatu sudut pandang, yaitu apakah mereka akan terus mengeluarkan obligasi, atau akan mencoba menerbitkan saham sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi perusahaannya. Tentu saja hasil dari pembahasan ini

nantinya diharapkan akan membantu PT.Indonesia Power dalam meningkatkan profitabilitas, efisiensi, dan efektivitas di perusahaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang akan diteliti adalah Analisa Penggalangan Dana Terbaik bagi PT.Indonesia Power, dalam usahanya untuk semakin meningkatkan keuntungan dan menjadi mampu merealisasikan rencana investasi-investasi yang dimiliki.

Adapun permasalahan yang ingin dilihat dari penelitian yang akan saya coba lakukan yaitu menyangkut beberapa permasalahan yaitu:

- Apakah kondisi keuangan PT.Indonesia Power sebenarnya mendukung usahanya dalam meningkatkan keuntungan serta merealisasikan rencana investasi-investasi yang dimiliki?
- Bagaimana "Potential Growth" kedepan yang dimiliki oleh Indonesia Power serta kemampuan mengembangkan usahanya tanpa "Go Public"?
- Metode penggalangan apa yang terbaik bagi PT.Indonesia Power dalam usahanya untuk semakin meningkatkan keuntungan serta merealisasikan rencana investasi-investasi yang dimiliki?

I.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui metode penggalangan dana seperti apa yang terbaik digunakan oleh PT.Indonesia Power, dalam usahanya untuk semakin meningkatkan keuntungan serta kemampuan merealisasikan rencana investasi-investasi yang dimiliki.

1. untuk membuka wawasan manajemen terhadap kemungkinan adanya alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaannya dengan cara menerbitkan obligasi dan

strategi pendanaan yang paling memungkinkan bagi PT.Indonesia Power secara keseluruhan.

2. mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak manajemen dalam menghadapi rencana-rencana investasi yang dimiliki perusahaan, dan mencoba untuk memberikan alternatif pembiayaan investasinya.

I.4. Manfaat Penelitian

Memberikan gambaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kepada para manajer keuangan dan pemerintah mengenai cara penggalangan dana dan optimasi struktur modal terbaik yang mungkin diterapkan pada perusahaan, dengan melihat kepada beberapa perusahaan pada industri sejenis, serta melihat keuntungan dan kerugian dari pilihan-pilihan yang ada, agar dapat mendapatkan pilihan yang terbaik. Dalam penelitian ini, lebih diarahkan pada sebuah BUMN.

I.5. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi analisis alternatif dan kemungkinan penggalangan dana untuk pengembangan usaha bagi PT.Indonesia Power dari sisi keuangan maupun operasional dari PT.Indonesia Power dalam usahanya untuk perolehan dana segar untuk investasi dan semakin meningkatkan keuntungan perusahaan dengan analisis *Investment Valuation*.

Kedua, penulis akan melakukan analisis kuantitatif menyangkut upaya PT.Indonesia Power kedepan untuk memberikan alternatif optimasi struktur modal terbaik yang memungkinkan untuk diterapkan oleh Indonesia Power, untuk dapat merealisasikan rencana investasi yang dimiliki, dengan tetap dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yang akan membantu dunia kelistrikan nasional.

I.6. Hipotesis

- Bahwa PT.Indonesia Power tidak memerlukan *IPO* atau "Go Public" memang merupakan jalan yang lebih baik bagi Indonesia Power.
- Bahwa dunia kelistrikan nasional dapat terus berupaya untuk mengurangi subsidi yang diberikan akibat defisit anggaran tiap tahunnya. Dalam hal ini, PT.Indonesia Power mampu untuk semakin meningkatkan kinerjanya untuk semakin dapat meningkatkan keuntungan melalui cara lain selain *IPO* atau "Go Public" agar dapat membantu pengurangan defisit anggaran yang akhir-akhir ini sering dialami oleh dunia kelistrikan nasional.
- Bahwa bagi Indonesia Power, optimasi struktur modal dapat menjadi lebih baik dengan kombinasi *Debt to Equity Ratio* tidak seperti saat ini.
- Bahwa dengan cara yang tepat, untuk PT.Indonesia Power dapat memiliki prospek kedepan yang lebih baik dari sisi keuangan dan operasional perusahaan tanpa menggunakan *IPO* atau "Go Public".

I.7 Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sbb:

1. Studi Lapangan: penulis mengadakan peninjauan langsung ke perusahaan yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan, caranya dengan wawancara langsung dengan nara sumber *Vice President* Pendanaan dan mengumpulkan data-data dalam bentuk prospektus perusahaan, laporan keuangan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan laporan-laporan lainnya yang diperlukan.

2. Studi Kepustakaan: merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku wajib dan buku-buku lainnya yang dianjurkan untuk dibaca sehubungan dengan obyek yang diteliti, serta dengan menggunakan bahan-bahan kuliah dan literatur lainnya yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

I.8. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika tulisan ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang penulisan yang terdiri dari beberapa sub-bab yang menguraikan latar belakang masalah, cakupan analisis, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR TERKAIT DENGAN KINERJA PT.INDONESIA POWER DAN METODE PENGGALANGAN DANA TERBAIK.

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang menyangkut Industrial Benchmarking yang mungkin dilakukan untuk upaya penggalangan dana terbaik yang mungkin dapat dilakukan oleh PT.Indonesia Power, dalam upayanya untuk meningkatkan keuntungan yang lebih baik pada periode-periode mendatang, dan

ikut membantu pengurangan defisit anggaran bagi dunia kelistrikan nasional.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan dasar metodologi terkait dengan upaya penggalangan dana terbaik yang mungkin dapat diaplikasikan pada PT.Indonesia Power, dengan metode “*Investment Valuation*” dan “*Capital Structure Optimation*”.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Memuat pembahasan terhadap masalah utama dalam skripsi ini. Dalam bab ini juga akan dilihat kondisi Struktur Modal seperti apa yang lebih baik bagi Indonesia Power Hal tersebut juga akan dilengkapi dengan antisipasi yang diperlukan manajemen dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang dilakukan, juga disertai dengan beberapa saran yang diberikan penulis terkait dengan kasus yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN